

STRATEGI CYBER HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Muhammad Ilham Alfarabi¹, Fitria Yuliani²

Program Studi Ilmu Komunikasi

^a Universitas Muhammadiyah Bengkulu

^b m.ilham.alfarabi.komunikasi.umb@gmail.com

INFO ARTIKEL

Keywords:

Pengelolaan
Cyber Humas
Good Governance

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Cyber Humas Dalam Mengujudkan *Good Governance* Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (Studi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data (*display data*) dan Penarikan kesimpulan serta verifikasi Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Media cyber yang digunakan adalah facebook dan instagram. Fokus dari cyber humas adalah informasi kegiatan pemerintah daerah, program-program pemerintah daerah. Kegiatan dinas Kominfo atau dari Pemda seperti pemberian informasi publik adalah melalui zoom meeting dengan perangkat desa dan kecamatan. Agar cyber humas ini dikelola menjadi good governance pemerintahan dengan melakukan publikasi, pemantauan, melakukan counter, sehingga apa yang diharapkan publikasi informasi pemerintah daerah itu sesuatu hal yang bisa menjangkau masyarakat Bengkulu Selatan. Good governace di Dinas Kominfo Bengkulu Selatan bahwa semuanya sudah berada di era digitalisasi, era revolusi industri dan semuanya sudah berbasis internet. Fokus dari cyber humas dalam mewujudkan good governance adalah mengawal publikasi terkait dengan pembangunan daerah. Cyber humas di Bengkulu Selatan dari sisi kinerjanya memang belum maksimal, karena dari sisi sumberdaya Manusianya masih terbatas.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang mendambakan dan memperjuangkan good governance. Namun, kondisi saat ini menunjukkan masih jauh dari optimis. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja tanpa wewenang, dan kurangnya integritas dan transparansi hanyalah sebagian kecil dari hambatan yang masih menghalangi tercapainya pemerintahan yang baik. (Erliansyah, 2017). Menurut Astuty dkk. (2017), kemampuan suatu bangsa untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik didukung oleh tiga pilar utama: pasar atau dunia usaha, masyarakat sipil, masyarakat sipil, masyarakat sipil, dan negara/pemerintah

(negara). Salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan, aktif menerapkan Good Governance dalam pemerintahannya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip panduan dari konsep Good Governance. Bagian Humas yang bertugas menyebarkan informasi pemerintah kepada masyarakat juga melakukan perubahan agar informasi dapat lebih efektif dan hemat waktu. Kegiatan periklanan yang memanfaatkan media web juga bisa disebut sebagai kegiatan *Cyber Humas*.

Hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik dapat dipahami sebagai acuan bagi proses dan struktur pemerintahan yang baik. Dengan tercapainya kondisi yang kondusif dan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat mewujudkan konsep Good Governance. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan adalah persyaratan minimum untuk tata kelola yang baik. Kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus terbuka, efektif, dan mampu menjawab kaidah fundamental keadilan. Keterlibatan masyarakat harus dilakukan pada setiap tahapan proses pengambilan keputusan sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik. (Iswanto, 2015).

Human interest saat ini, faktor terkuat yang menentukan tercapainya sebuah negara dan good governance adalah kepentingan manusia. Fakta bahwa setiap orang memiliki kepentingan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. baik kepentingan individu, kelompok, atau bahkan kepentingan masyarakat nasional dan internasional. Selalu ada konflik yang harus diselesaikan untuk mewujudkan masing-masing kepentingan tersebut. Demikian pula, hambatan utama untuk mencapai apa yang disebut sebagai “Good Governance” selalu merupakan konflik kepentingan. Sulit untuk mencapai kesepakatan ketika orang dan kelompok dipisahkan oleh kepentingan dan menghadapi hambatan. (Iswanto, 2015).

Pada hakekatnya, istilah “*Good Governance*” mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang keduanya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. sebagai konsensus antara warga negara, pemerintah, dan sektor swasta tentang bagaimana menjalankan pemerintahan suatu negara. Negara berperan dalam menawarkan jenis-jenis bantuan kepada pemerintah bantuan perorangan dengan kerangka pemerataan yang layak dan kerangka administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat pada umumnya. mengacu pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembangunan manusia, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah (penyelenggara negara), dunia bisnis atau korporasi (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaian) semuanya dipengaruhi oleh *Good Governance*. Ketiga majelis ini berperan dan saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Respons yang signifikan adalah sinkronisasi dan keharmonisan di antara pihak-pihak tersebut. Namun, mengingat keadaan Indonesia saat ini, hal itu masih menjadi tantangan untuk terjadi. (Masnun, 2018).

Menurut Masnun (2018), salah satu prinsip penunjang konsep Good Governance Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah bahwa kehumasan pemerintah tetap berada dalam ruang lingkup pekerjaan kehumasan, khususnya sebagai penyebarluasan informasi dan membangun citra pemerintah secara sistem keterbukaan informasi. Humas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai menggunakan media online sebagai sarana penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat pada tahun 2017. Sejak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mulai menggunakan Cyber Humas, pekerjaan kehumasan lebih banyak dilakukan melalui media cyber tanpa meninggalkan tradisi pekerjaan humas.

Public relations adalah sarana yang secara praktis dapat melengkapi kemampuan administrasi, membuat korespondensi yang bersahabat, membuat penilaian populer yang baik di dalam asosiasi atau perusahaan. Manajemen humas mencakup peran, fungsi, ruang lingkup dan aktivitas/kegiatan humas. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif komunikasi yang didukung oleh suatu organisasi dikenal sebagai Manajemen Humas (PR). Begitu pula dengan pengelolaan Cyber Humas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerapkan good governance. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Cyber Humas ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, diperlukan pengelolaan kegiatan Cyber Humas. (Erliansyah, 2017).

Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Humas saat ini aktif berkontribusi langsung dalam mewujudkan gagasan *Good Governance*. Humas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan senantiasa menyediakan media online dengan informasi terkini tentang segala berita dan acara terkait pemerintahan. Humas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya bekerja dengan prinsip dapat menginformasikan kepada masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dan memberitahukan bahwa pemerintah juga telah mengubah cara berkomunikasi, salah satunya melalui media online atau internet.

Menurut Sundarari (2020), kegiatan kehumasan dilakukan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan yang dituju. Tujuan suatu perusahaan adalah untuk membangun citra positif agar mendapatkan kepercayaan publik. Profesi humas dituntut untuk bersikap profesional dalam menyikapi isu-isu yang muncul dalam sebuah perusahaan atau organisasi karena citra positif memegang peranan yang begitu signifikan dalam membina kehumasan yang positif. Seperti yang ditunjukkan oleh (Putra, 2019) gerak mengandung arti perbuatan atau perbuatan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan atau latihan yang terjadi, baik fisik maupun non fisik, adalah perbuatan. Aktivitas dalam PR berhubungan erat dengan perkembangan opini publik dan pergeseran sikap masyarakat. Kegiatan kehumasan menekankan “Komunikasi Timbal Balik (*Two Ways Traffic Communications*)” antara lembaga dengan masyarakat, dengan tujuan menumbuhkan saling pengertian dan dukungan terhadap suatu tujuan tertentu.

“Kegiatan kehumasan adalah mediator yang menjembatani kepentingan organisasi, lembaga perusahaan, dan publiknya terkait dengan aktivitas kehumasan itu sendiri,” ungkap Putra (2019). Pencarian fakta (*fact finding*), perencanaan (*planning*), komunikasi (*communicating*), dan evaluasi atau pemantauan (*evaluating*) adalah semua komponen kegiatan atau operasi humas. Fungsi manajemen dalam konsep kehumasan bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan cita-cita yang menyenangkan bagi suatu lembaga, organisasi, organisasi yang olah raganya sekaligus atau tidak secara langsung berdampak pada masa depan lembaga, kelompok, korporasi tersebut. (Putra, 2019)

Humas memiliki rencana tindakan dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Tujuan keseluruhan dari program kerja dan kegiatan periklanan yang berbeda di lapangan adalah untuk membuat hubungan yang menyenangkan dengan masyarakat umum atau mitra, kelompok kepentingan yang bersangkutan. Perencanaan program kerja dapat terlaksana apabila disusun dengan baik melalui manajemen kehumasan yang profesional, dimana hasil atau sasaran dapat dipertanggungjawabkan. (Putra, 2019).

Cyber Humas merupakan salah satu bentuk humas yang menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini nantinya dapat berfungsi sebagai ajang komunikasi dua arah, yang sejalan dengan tujuan menggunakan PR sebagai jembatan antara organisasi dan khalayaknya. Pengurus Humas Digital ini selesai dalam beberapa tahap, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pengecekan (penilaian). Setiap awal tahun, tahap perencanaan anggaran tahunan digunakan untuk merencanakan kegiatan *Cyber* Humas. (Tarifu et al., 2017).

2. Metode Penelitian

2.1. Pendekatan penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sebuah metode penelitian yang dikenal sebagai metodologi kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati.

2.2. Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan observasi untuk mengamati atau mencatat peristiwa dengan cara menyaksikannya secara langsung. Dalam ulasan ini, para ilmuwan menggunakan strategi persepsi partisipatif yang terlibat dengan latihan sehari-hari dengan objek penelitian yang diperhatikan. Peneliti sepenuhnya berpartisipasi dalam operasi sumber data. (Sugiyono, 2017:22).

Wawancara merupakan salah satu jenis korespondensi verbal yang bertujuan untuk mendapatkan data. Dokumentasi adalah studi yang menambahkan wawancara dan observasi ke dalam campuran. Dokumentasi merupakan kumpulan file penting seperti manual, foto, dan data informasi dalam penelitian ini.

3. Teori

The Excellence Theory

Sebuah studi oleh James E. Grunig, Larissa A. Grunig, dan David M. Dozier meneliti praktik organisasi yang dikenal sebagai manajemen humas dan manajemen komunikasi, khususnya praktik yang berkaitan dengan publisitas, salah satu dari empat jenis model atau filosofi humas. Studi ini mengarah pada pengembangan teori ini. atau sebaliknya ahli pers, data publik, dua arah tidak rata, dan dua arah simetris.

James Grunig mengatakan bahwa teori Excellence Humas adalah pengembangan dari empat model humas yang digunakan para profesional humas untuk membangun hubungan dengan publik. Nama lain untuk model ini adalah “sejenis proses kegiatan dalam PR”. *Press agency, public information, two-way asymmetric, dan two-way symmetric* adalah empat model tersebut. Keempat model ini dibuat dengan mempertimbangkan empat aspek pokok, khususnya bantalan korespondensi, keseimbangan kepentingan antara dua pertemuan (tujuan), saluran, dan aspek moral. “Tahapan representatif dalam sejarah Humas” dapat diringkas dengan empat model tersebut. (Kriyantono, 2014).

Elemen bantalan korespondensi menggambarkan perilaku korespondensi antara asosiasi dan orang-orang pada umumnya, apakah pembicaraan satu arah menyebarkan data (satu arah) atau wacana dua arah yang memperdagangkan data (dua arah). Posisi yang seimbang atau simetris antara organisasi dan publiknya (kedua belah pihak, kolaborasi, dan kerjasama) dan posisi yang tidak seimbang atau asimetris (satu sisi dan advokasi kepentingan organisasi) merupakan

dimensi keseimbangan kepentingan. Saluran komunikasi interpersonal dan media adalah subjek diskusi dalam dimensi saluran. Dimensi etis membahas tingkat etika aktivitas Public Relations, seperti dipertimbangkan atau tidaknya tanggung jawab sosial dalam Public Relations.

Konsekuensi dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa model periklanan terbaik adalah model genap dua arah karena keuntungan dari pemahaman bersama dan promosi dua arah. Menurut teori ini, nilai komunikasi dapat dilihat pada empat tingkatan, yaitu :

1. Sebagai fungsi manajemen yang krusial, Humas harus diperkuat oleh organisasi tingkat program yang efektif
2. Tingkat fungsional: Humas harus terpisah dari pemasaran dan fungsi manajemen lainnya, termasuk komunikasi
3. Organisasi yang efektif harus menggunakan model simetris dua arah untuk membangun komunikasi dan hubungan internal dan eksternal
4. Dampak organisasi terhadap organisasi lain dan masyarakat umum harus diketahui pada tingkat sosial-organisasi. Tanpa tanggung jawab sosial, sebuah organisasi tidak dapat disebut efektif

Kekuatan mendasar dari hipotesis kebesaran adalah anggapan bahwa korespondensi yang seimbang adalah praktik PR yang terbaik dan bermoral. James E. Grunig, di sisi lain, mengatakan bahwa teori keunggulan sebagai standar ideal dan kemandirian hubungan masyarakat mungkin belum tentu berlaku untuk bisnis dari negara yang berbeda. Menurut Kent & Taylor (Sa'diah, 2018), model agen pers, model pengaruh pribadi, model informasi publik, model asimetris, dan model simetris merupakan praktisi PR yang paling berpengaruh di Bosnia (excellence). Menurut teori keunggulan, model komunikasi simetris tidak cocok untuk praktik PR Bosnia, yang berbeda dari PR di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada.

Peneliti memilih teori keunggulan karena telah dianggap sebagai teori normatif, yang merupakan indikator dari organisasi PR yang efektif.

4. Temuan dan Pembahasan

Media cyber di Bengkulu selatan, informan mengatakan bahwa media cyber yang digunakan adalah facebook dan instagram. Akun facebook sudah memiliki tujuh ribu pengikut untuk kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah daerah Bengkulu Selatan di tahun 2021 memiliki media center itu di Dinas Kominfo dari 2020-2021, sesuai dengan fungsi kehumasan itu di Dinas Kominfo dari 2020. Terkait dengan tim itu ada di SK Bupati Bengkulu Selatan terdiri dari sekitar 7 orang, mereka aktif terkait seluruh kegiatan Bupati Bengkulu Selatan, Sekretaris Daerah, Pimpinan daerah kemudian media center meliput apa yang disampaikan oleh Bupati maupun sekretaris daerah itu kemudian di rilis berita di Facebook, Instagram, Website dan itu selalu update kemudian di tahun 2021 sangat aktif jadi rekan-rekan media cetak dan media elektronik kalau belum mendapatkan berita mereka mengambil berita dari media center tadi.

Mengenai prosedur yang ada di pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi, bahwa adanya kerjasama di 142 media, itu terdiri dari 2 media elektronik RB TV dengan BE TV, yang media cetak Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspres, Radar Selatan, Radar Bengkulu, Radar Kaur, Radar Seluma dan sisanya media online.

Di tahun 2022 pemerintah daerah memberikan syarat kepada teman-teman wartawan menyesuaikan dengan syarat tersebut jadi dikeluarkan lagi perubahan di peraturan Bupati No. 23 Tahun 2022 disitu lengkap syarat-syarat pers untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah. Lalu kami dari tim dinas Kominfo melakukan komunikasi ketika perusahaan pers ingin bekerjasama melengkapi syarat-syarat, setelah kami verifikasi ada 142 tadi media yang bekerjasama. Untuk tahun 2023 ini kami sedang proses verifikasi berkas yang sudah disampaikan ke kami ada 182 perusahaan pers untuk kerjasama di tahun ini. Hasil wawancara mengenai apa yang di fokuskan dari cyber humas dalam mengelolaa pemerintahan yang baik di Bengkulu selatan.

Fokus dari cyber humas adalah informasi kegiatan pemerintah daerah, program-program pemerintah daerah. Selain publikasi humas juga bekerja sama dengan media dalam menyebarluaskan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Humas juga bekerjasama dengan masyarakat jika masyarakat memiliki informasi atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah Bengkulu Selatan.

Langkah mewujudkan dan memanfaatkan good governance di Diskom info Bengkulu Selatan adalah melakukan misi ke 4 bupati tata kelola pemerintahan yang baik berbasis elektronik, memulai melakukan upaya untuk mendorong adaptasi pemerintahan daerah.

Sistem penataan selesai sebelum suatu tindakan dilakukan. Perencanaan ibarat otak dari suatu kegiatan yang perlu dilakukan karena semua pemikiran dalam proses perencanaan difokuskan untuk membicarakan proses melakukan sesuatu sampai akhir kegiatan, yang disebut evaluasi kegiatan Penyusunan program mengingat semua yang akan membantu untuk cara yang

paling umum untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dan mengurangi bahaya yang akan terjadi, dua di antaranya.

Dalam menentukan pengawas latihan periklanan digital, diperlukan bakat dan kapasitas yang dapat mendukung kegiatan ini. Kemampuan manajer untuk menggunakan media siber dalam pekerjaan mereka sangat penting untuk keberhasilan aktivitas PR siber. Akan ada kesulitan dengan aktivitas ini jika perencanaan sudah selesai tetapi manajer tidak memiliki keahlian hubungan masyarakat *cyber* yang diperlukan. Menurut McCroskey, kompetensi, sikap, tujuan, kepribadian, dan dinamika komunikator semuanya berkontribusi pada kredibilitas mereka. Kompetensi seorang komunikator adalah penguasaannya terhadap topik yang dibicarakan.

Perencanaan Audiens Dalam kegiatan kehumasan siber, warga Bengkulu Selatan menjadi fokus. Humas berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara keduanya. Humas merencanakan khalayak terlebih dahulu dalam hal ini. Sebuah studi tentang khalayak sasaran umum dan target mereka dilakukan oleh hubungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat Bengkulu Selatan merupakan target audiens kehumasan, namun kehumasan berfokus pada orang dewasa sebagai target audiens evaluasi Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam kegiatan periklanan digital advertising menggunakan beberapa media korespondensi yang berasal dari aplikasi yang dibuat oleh advertising seperti E-kliping, SIKIKO dan Siwarta. Selain itu, situs web berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi dan platform media sosial seperti Instagram dan *Facebook*. Media semacam ini digunakan oleh humas karena ingin memanfaatkan segala media siber yang memudahkan mereka menjangkau sasarannya. Media diarahkan untuk membantu profesional hubungan masyarakat dalam mengelola kegiatan *cyber public relations*.

Humas melibatkan seluruh aspek pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, OPD-OPD, dan wartawan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahap pelaksanaan sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu agar informasi yang disampaikan sampai kepada khalayaknya, yang merupakan penduduk umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media, iklan dapat menjangkau berbagai jenis individu. tidak dibatasi oleh usia, lokasi, kelas ekonomi, kelas pekerjaan, kelas sosial, atau faktor lain yang mungkin berfungsi sebagai batas dalam masyarakat.

Siklus komunikasi dan pengamatan dapat diselesaikan dalam rentang waktu setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun. Dalam hal ini, humas berkomunikasi setiap saat, atau setiap hari; pemantauan bulanan terjadi sekali per bulan. Pada saat SKP dapat dilakukan monitoring tahunan. Dalam melakukan latihan *cyber public relations*, tanggung jawab pihak-pihak terkait merupakan salah satu hal yang signifikan. Melaksanakan kegiatan periklanan digital sesuai dengan tanggung jawab utama dan komponen masing-masing unit memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti dituturkan oleh Bob Julius, *Cyber Humas* atau yang biasa disebut E-PR merupakan penggerak PR atau spesialis periklanan yang menggunakan media web untuk tujuan exposure. Batasan kerja dapat ditetapkan antara pemimpin dan bawahan ketika tugas dibagi. Anggota staf diperlakukan sebagai bawahan oleh pemimpin yang bertanggung jawab atas tanggung jawab dan koordinasi. Kelancaran kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab bawahan yang tanggung jawab administratifnya antara lain mengelola kegiatan kehumasan *cyber public relations*. Karena bawahan merupakan pelaksana dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya, maka dapat dikatakan admin manajemen merupakan faktor yang paling menentukan dalam mewujudkan kegiatan ini.

Proses evaluasi datang pada akhir proses manajemen. Ini adalah tahap meninjau kembali dan mengevaluasi tindakan sebelumnya untuk menentukan apakah tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak dan apakah memenuhi tujuan yang diantisipasi atau tidak. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pada tahapan evaluasi ini, tahapan inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Senada dengan itu, Humas Kabupaten Bengkulu Selatan juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan *cyber public relations* sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana prosesnya dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya.

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan *Cyber Humas* Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Media cyber yang digunakan adalah facebook dan instagram dimana yang mengelola adalah protocol dan komunikasi pimpinan Dinas Kominfo. Prosedur apa yang ada di pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi, informan menjelaskan bahwa adanya kerjasama di 142 media, itu terdiri dari 2 media elektronik RB TV dengan BE TV, yang media cetak Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspres, Radar Selatan, Radar Bengkulu, Radar Kaur, Radar Seluma dan sisanya media online. Fokus dari cyber humas adalah informasi kegiatan pemerintah daerah, program-program pemerintah daerah. Kegiatan dinas Kominfo atau dari Pemda seperti pemberian informasi public adalah melalui zoom meeting dengan perangkat desa dan kecamatan. Agar cyber humas ini dikelola menjadi good governance pemerintahan dengan melakukan publikasi, pemantauan, melakukan counter, sehingga apa yang diharapkan publikasi informasi pemerintah daerah itu sesuatu hal yang bisa menjangkau masyarakat Bengkulu Selatan. Humas pemerintah daerah melakukan pengelolaan terhadap cyber untuk publikasi, pemberian informasi, membangun komunikasi dengan publik yang semuanya dilakukan dengan tugas pokok dan fungsi dinas Kominfo. Langkah mewujudkan dan memanfaatkan good governance di diskom info Bengkulu Selatan dijelaskan oleh informan

adalah melakukan misi ke 4 bupati tata kelola pemerintahan yang baik berbasis elektronik. Good governance di Dinas Kominfo Bengkulu Selatan bahwa semuanya sudah berada di era digitalisasi, era revolusi industri dan semuanya sudah berbasis internet. Fokus dari cyber humas dalam mewujudkan good governance adalah mengawal publikasi terkait dengan pembangunan daerah. Cyber humas di Bengkulu Selatan dari sisi kinerjanya memang belum maksimal, karena dari sisi sumberdaya manusianya masih terbatas.

References

- Astuty, S., Setyastuti, Y., Maulina, N., & Hanief, L. (2017). Analisis Fungsi Dan Peran Humas Dalam Upaya Implementasi *Good Governance*. *Jurnal of Communication Studies*, 2(1), 100–118.
- Erliansyah, B. (2017). Manajemen Pengelolaan *Cyber Humas* Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Kota Payakumbuh. *Hilos Tensados*, 1, 1–476.
- Iswanto, Y. K. (2015). Akuntabilitas Publik Dalam Proses Hukum Menuju Tata Kelola. *Lex Administratum*, 3(8), 13–22.
- Masnun, M. (2018). *Good Governance* Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1), 175–182. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.41>
- Putra, M. (2019). *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (Ylpi) Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Komunikasi*. 1–86. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1845>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tarifu, L., Ridwan, H., Nurhaliza, W. O. S., & Hereyah, Y. (2017). Komunikasi, Media dan New Media dalam pembangunan daerah. In *Angewandte Chemie International*